



**"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"**

## **"FORUM WARGA BURUH MIGRAN (FWBM) SEBAGAI MEDIA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN"**

Oleh

**"Dr. Rili Windiasih, M.Si & Dr. Toto Sugito, S.Sos., M.Si"**

**"Dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman , Jl. Kampus Grendeng No. 1  
Purwokerto Jawa Tengah Kode Pos 53122"**

**"rili.1997unsoed@gmail.com"**

### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan solusi bagi pemberdayaan buruh migran melalui pendekatan komunikasi partisipatif di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian dengan menggunakan purposif dari para mantan dan calon buruh migran di lembaga Forum Warga Buruh Migran (FWBM) di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Analisis data menggunakan model interaktif dengan mereduksi, pengolahan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) Forum Warga Buruh Migran (FWBM) belum sepenuhnya mengetahui aturan hukum perburuhan, kelembagaan buruh migran di desa masih lemah, kurang adanya kesadaran mengelola remitan, belum ada kesempatan yang lebih terbuka untuk aspirasi dan program pembangunan di desa bagi buruh perempuan. (2) FWBM memerlukan program sosialisasi, pelatihan dan pendampingan di bidang advokasi, penguatan kelembagaan perempuan, pemberdayaan ekonomi dengan pengelolaan remitan sebagai modal usaha yang akan diperjuangkan di Musrenbang desa.

Kata kunci: *Komunikasi Partisipatif, Pemberdayaan, Pendampingan, Buruh Migran*

### **ABSTRACT**

The research aims to identify and analyze problems, potential and solutions for empowering migrant workers through a participatory communication approach in Cilacap Regency, Central Java. The research used qualitative method of case study by collecting data through interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation, and documentation. The research informants was determination by used a purposive method from migrant workers at the Migrant Workers' Forum Institute in Danasri Kidul Village, Nusawungu District, Cilacap Regency. Data analysis were interactive model by reducing, processing and conclusions. The results showed (1) the Migrant Workers Forum did not know the rules of labor law, the institutional was still weakness of migrant workers in the village, and awareness of managing remittances, there was no opportunity for women workers aspirations of development programs in the village.. (2) Migrant workers' forums have require socialization programs, training and assistance in the field of advocacy, strengthening women's institutions, economic empowerment by managing remittances as business capital, which will be fought in the village Musrenbang.

*Keywords: Participatory Communication, Empowerment, Assistance, Migrant Workers*



## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan dan kemajuan pembangunan nasional hakekatnya tergantung pada pembangunan di tingkat desa yang merupakan pondasi pembangunan yang menyokong semua kebutuhan ekonomi mulai dari pertanian, perkebunan, peikanan, peternakan dan tempat pariwisata. Karena gemerlap mewahnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi perkoataan jika faktor pendukungnya dari kekuatan ekonomi asing yaitu import dan industrialisasi yang tidak mendukung kekuatan ekonom kerakyatan yang berbasis pertanian, maka sesungguhnya menunjukkan rapuhnya pembangunan ekonomi. Permasalahan urbanisasi, kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk di perkotaan, perburuhan, dan buruh migran luar negeri merupakan fenomena realitas yang menunjukkan masyarakat tidak memiliki kenyamanan dan jaminan kesejahteraan di kampung halamannya yaitu di desa, maka mencari nafkah di perkotaan dan luar negeri menjadi buruh atau pegawai menjadi pilihan utama yang dianggap paling prospektif. Sebagaimana menurut Sulaiman et al. (2016), Sugito et al. (2018) dan studi pendahuluan peneliti (2018) tentang pemberdayaan mantan buruh migran perempuan di Desa Sidaup Kecamatan Binangun, Desa Karangtawang, dan Desa Danasri Kecamatan Karangtawang Kabupaten Cilacap bahwa masyarakat mau menjadi buruh migran karena masih menilai sebagai profesi yang paling menjanjikan untuk cepat mendapatkan penghasilan yang besar dan kesejahteraan ekonomi. Namun dampak negatif yang terjadi yaitu adanya urbanisasi dan lonjakkannya buruh migran, sehingga desa ditinggalkan masyarakatnya yang mengadu nasib di perkotaan dan luar negeri sehingga sumber daya serta potensi ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya desa tidak dikelola, dipertahankan, dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Desa hanya menjadi kampung halaman tempat dilahirkan dan menjadi tujuan mudik lebaran, bukan menjadi wilayah kekuatan ekonomi kerakyatan masyarakat.

Padahal desa pesisir di sepanjang pantai selatan di Kabupaten Cilacap memiliki potensi ekonomi perikanan dan wisata pantai sebagai kawasan pembangunan kemaritiman yang sangat potensial dan strategis untuk pembangunan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan pesisir. Hal ini sesuai salah satu sasaran dan capaian dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 bahwa Indonesia dapat memperoleh banyak keuntungan dari bidang maritim dengan membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan, kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Perwujudannya dengan strategi kerangka strategis dan kebijakan penguatan konektivitas diantaranta yaitu (1) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems. (2). Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland). Pentingnya pembangunan desa sebagai miniatur negara yang paling dekat dengan masyarakat ditagaskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43 pada Pasal 78



(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa, termasuk untuk masyarakat mantan buruh migran dan masyarakat pesisir, harus dapat didukung dengan implementasi kebijakan berupa pemberdayaan ekonomi secara partisipatif (yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan, dengan tiga prioritas utama yaitu peningkatan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur. Menurut Subianto (2006), Sutaat et al. (2011), Dewi & Yazid (2017) memerlukan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan supaya dapat memanfaatkan pendapatan buruh migran yang dikirimkan ke desa (remitan) dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan investasi, bukan konsumtif.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012) pemberdayaan sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking*, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan perempuan mantan buruh migran dalam inklusi sosial dan peningkatan partisipasi ekonomi.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka terdapat permasalahan buruh migran yang kompleks mulai dari proses keberangkatan, ketika bekerja (di tempat kerja) dan setelah pulang bekerja ke tempat asal khususnya Forum Warga Buruh Migran (FWBM). Sebagaimana menurut hasil riset Sutaat et al. (2011) kondisi sosial ekonomi calon TKI dan keluarganya di daerah asal tergolong rendah, terutama dari aspek ekonomi; meskipun bila dilihat pada kondisi rumah maupun kepemilikannya tidak menunjukkan kemiskinan. Maka terdapat permasalahan yang juga harus mendapat perhatian adalah bagaimana di desa sebagai lokasi tempat tinggal bagi calon dan mantan buruh migran memiliki program pemberdayaan secara komprehensif. Artinya calon dan mantan buruh migran terlibat penuh dalam rangkaian pemberdayaan, mulai proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan di desa, dalam suatu Wahana Musyawarah.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif yang dapat merancang sebuah program rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan (*social engineering and rural development*) dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, solusi serta model komunikasi partisipatif untuk mensosialisasikan konsep Forum Warga Buruh Migran (FWBM) yang dibahas, dihasilkan dan disepati bersama oleh para subjek penelitian. Koesoemowardani dan Sumardjo (2008 : 64) bahwa untuk mengefektikan program pendampingan, perlu pendekatan model komunikasi relasional, yang terbukti partisipatif



melibatkan seluruh komponen. Begitupun menurut hasil penelitian Amanah (2010 : 17) strategi komunikasi dalam pembangunan dalam hal ini wilayah pesisir sebagai lokasi penelitian, memerlukan perencanaan yang matang dalam rancang bangun strategi komunikasi pembangunan, melibatkan peran serta masyarakat pesisir dan stakeholders terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga tindak lanjut.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan solusi bagi pemberdayaan buruh migran melalui pendekatan komunikasi partisipatif di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Hal ini terinspirasi dari hasil penelitiannya Nursiti dan Susana (2012 :68) tentang konsep Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) sebagai kegiatan sejenis Musrenbang tapi khusus untuk perempuan. Musrena adalah kegiatan khas yang diperkenalkan oleh Kota Banda Aceh untuk memastikan perempuan dapat menyampaikan aspirasinya tanpa hambatan apapun. Saat ini, sejumlah kota/kabupaten di Aceh dan wilayah lain di Indonesia juga melakukan hal serupa setelah belajar dari pelaksanaan Musrena di Banda Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menyelidiki fenomena dalam konteks realitas nyata kemudian di uraikan dan dijelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa (Kriyantono 2006).

Prosedur pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini dengan mempergunakan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Bungin 2008). Prosedur pelaksanaannya yaitu observasi dan wawancara dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu: (1) mulai dari studi pendahuluan dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan data, menganalisis suatu daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian, pembukaan akses atau pendekatan, termasuk perumusan masalah, tujuan penelitian dan desain penelitian. (2) Ketika proses penelitian di lapangan baik sebelum, dalam proses dan setelah pelaksanaan FGD; (3) Setelah proses penelitian untuk verifikasi data dan triangulasi hasil penelitian.

Lokasi penelitian di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut adalah salah satu pusat buruh migran terbanyak di Cilacap dan terdapat komunitas Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai lembaga advokasi, lembaga pemberdayaan dan kelompok pekerja (*community worker*) yang akan menjadi pionir bagi pelaku pembangunan dan agen perubahan di masyarakat desa. Penentuan subjek penelitian dengan purposif yaitu pengurus Forum Warga Buruh Migran (FWBM), kelompok pemberdayaan perempuan dan tokoh masyarakat serta pemerintah desa.

Menganalisis data penelitian tentang pemberdayaan perempuan mantan buruh migran yang begitu kompleks permasalahan baik penyebab maupun dampaknya, maka relevan menggunakan analisis data lintas kasus atau Cross Case Analysis dari Milles dan Huberman



(2007) yaitu mencari keunikan, kesamaan, perbedaan dan kedalaman dari lintas atau berbagai kasus yang ditemukan yang selanjutnya dibuat klarifikasi, klasifikasi dan kategorisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Forum Warga Buruh Migran di desa Danasri, Nusawungu berawal sejak tahun 2008. Forum ini mewadahi para mantan buruh migran sekaligus menjadi pelindung para buruh migran yang memiliki kasus. Forum ini sekaligus memberdayakan para buruh migran dengan berbagai kegiatan yang sifatnya menyediakan lapangan pekerjaan dan pelatihan minat dan bakat. Keberadaan Forum Warga Buruh Migran (FWBM) mampu meningkatkan kapasitas komunitas terutama dalam hal bernegosiasi dan membangun kesepakatan dengan PJTKI. Kondisi ini sangat berbeda sebelum Forum Warga dideklarasikan tahun 2011, di mana PJTKI dominan dan menentukan proses negosiasi yang berlangsung.

FWBM merupakan kelompok buruh migran dampingan dari Pimpinan Cabang Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (PC Lakpesdam ) Kab. Cilacap. Selama ini FWBM memiliki agenda rutin untuk berkegiatan sebulan 2 kali, yaitu Diskusi Kampung (Diskam) dan Sekolah Buruh Migran.

Desa Danasri sendiri menjadi desa dibentuknya Forum Buruh Migran tidak semata-mata karena desa ini daerah gudang TKI, tetapi melihat kenyataan di lapangan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan daerah pemasok buruh migran terbesar di Jawa Tengah. Diantara daerah-daerah di kabupaten Cilacap yang menjadi kantong TKI tersebar di 3 Kecamatan yaitu Nusawungu di 10 kelurahan, Adipala 10 kelurahan, dan Binangun 10 kelurahan. Dengan demikian terdapat total 30 kelurahan di kabupaten Cilacap yang menjadi penyumbang TKI terbesar di Jawa Tengah. Namun dari 30 kelurahan tersebut, desa Danasri tidak termasuk pada golongan kantong TKI, itulah sebabnya Forum Warga Buruh Migran terdapat di Desa Danasri Kidul, Nusawungu.

Forum Warga Buruh Migran (FWBM) diketuai oleh ibu Tun Habibah, yang mana beliau banyak memiliki peran selain dalam pemberdayaan mantan buruh migran, beliau kerap kali terjun langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus terkait buruh migran. Banyaknya kasus yang menimpa para buruh migran di luar negeri dan perbedaan yang signifikan antar kasus membuat diperlukannya tindakan baik dalam perlindungan maupun pemberdayaan buruh migran.

Berdasarkan proses studi pendahuluan tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, solusi serta model komunikasi pembangunan partisipatif dalam mensosialisasikan konsep Forum Warga Buruh Migran (FWBM) bagi pemberdayaan mantan atau calon buruh migran di Kabupaten Cilacap sebagai daerah buruh migran terbesar di Jawa Tengah.

Pendekatan yang sangat relevan untuk merancang Forum Warga Buruh Migran (FWBM) adalah dengan pendekatan komunikasi partisipatif, sebagaimana menurut Mefalopulos (dalam



Dasgupta, 2009) komunikasi untuk pembangunan dapat menghasilkan partisipasi, dialog, dan penyebaran pengetahuan penting (generating participation, dialogue, and dissemination of vital knowledge). Komunikasi juga dapat membantu, mendukung dan mengadopsi model pembangunan dengan berdialog yang mengkolaborasi antara semua pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan sebagai bentuk terbaik dari pendidikan bersama.

Praktek komunikasi partisipatif dalam pembangunann, Menurut Steeves (Porras dan Steeves, 2009) ditandai adanya tatap muka secara setara atau egaliter dengan berdialog, yang melibatkan refleksi dan tindakan, serta tanpa perbedaan hirarki diantara orang-orang yang berdialog, mengakui bahwa kedua pihak baik sebagai penindas dan yang tertindas sama-sama membutuhkan kebebasan

### **Mengkonstruksi Pemberdayaan Forum Warga Buruh Migran (FWBM)**

Peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan penyebaran angket dan melakukan FGD I dengan metode brainstorming untuk menampung berbagai aspirasi, ide, dan saran dengan subjek penelitian Forum Warga Buruh Migran (FWBM) untuk mengidentifikasi permasalahan, potensi dan proseppek. FWBM merupakan aktor pemberdayaan yang menarik untuk dikonstruksi khususnya dalam membuat perencanaan program, memperjuangkan atau mebusulkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebagai bentuk penegakkan inklusi sosial di kalangan buruh dan mantan buruh migran.

Inklusi sosial merupakan konsep yang memberikan setiap orang memiliki hak dasar, akses dan dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dalam masyarakat (Wirutomo 2013) . Inklusi sosial memerlukan pendekatan dan program multidimensi meningkatkan penghasilan, memperkuat akses jejaring sosial, menciptakan layanan umum yang aksesibel dan meningkatkan kualitas hidup di sebuah kawasan. (Pierson, 2010). Terdapat indikator dari konsep inklusif yaitu (a) adanya partisipasi difabel; (b) adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel; (c) terjaminya aksesibilitas; dan (d) adanya sikap inklusif warga kotanya (Maftuhin 2017). Inklusi sosial sebagai upaya untuk mendorong masyarakat membangun relasi sosial dan solidaritas, sehingga bisa membuka akses dan penerimaan kepada semua warga negara tanpa pengecualian, dan dilakukan cara sukarela tanpa paksaan. Kemudian secara lengkap cakupan inklusi sosial adalah Pertama, hak kelompok marjinal yang meliputi: (a) hak berpartisipasi; (b) hak mendapatkan pelayanan dan informasi; dan (c) hak untuk mengawasi. Kedua, kewajiban pemerintahan desadiantaranya: (a) keharusan menyelenggarakan pemerintah dengan prinsi demokratis dan nondiskriminatif; (b) keharusan berkoordinasi dan melibatkan semua kelompok kepentingan dalam desa. Dalam Konteks Penataan desa, Inklusi Sosial bisa dilihat dalam bentuk keharusan penetapan dan perubahan status desa dilakukan atas prakarsa atau kehendak masyarakat. Sedangkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, tentang kewajiban pemerintahan desa maupun hak masyarakat, pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang sama kepada semua kelompok masyarakat. Ketiga, dalam ranah pembangunan yaitu: (a) keterlibatan warga



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"  
19-20 November 2019  
Purwokerto*

desa dalam perencanaan desa lewat masyarakat desa; (b) ikut serta menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa; (c) mendapatkan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan (d) terlibat dalam pendirian BUMDes. Inklusi dalam hal ini tidak dikhususkan pada kelompok marjinal tetapi kepada semua kelompok marjinal. Keempat, Pembuatan peraturan desa, bahwa inklusi sosial dalam Undang-Undang desa secara tegas memosisikan Desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok marjinal dengan memberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan peraturan desa. (Rais 2017).

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat matrik hasil identifikasi dan analisis sebagai konstruksi pemberdayaan FWBM Cilacap pada tabel 1.

Tabel 1 Mengkonstruksi Pemberdayaan FWBM Cilacap

No	Identifikasi Masalah	Potensi dan Pospek	Program Pemberdayaan
1	Ketidaktahuan informasi mengenai: (i) persyaratan dokumentasi untuk bekerja di luar negeri, (ii), hak dan kewajiban buruh migran, (iii) aturan hukum, kebiasaan dan budaya masyarakat di negara tujuan	Desa dapat berperan sebagai agen sosialisasi, informasi dan perlindungan bagi calon buruh migran yang akan ke luar negeri Desa bisa dijadikan sebagai lembaga pertama dan terdekat bagi calon buruh migran untuk mengantisipasi percaloan dan penipuan dalam pemberangkatan buruh ke luar negeri	Penyuluhan atau Sosialisasi dan pelatihan bagi aktivis Forum Warga Buruh Migran (FWBM) dan aparat desa mengenai pengetahuan peraturan perburuhan terutama tentang buruh migran Melakukan pendampingan tentang kesadaran hukum (hak-dan kewajiban buruh) Membentuk tim khusus penanganan buruh migran di tingkat desa
2	Belum adanya kesadaran untuk mengelola remitan sebagai modal atau investasi usaha di kampung halaman. Selama ini remitan yang masuk hanya untuk kebutuhan konsumtif seperti untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, membangun rumah, beli sawah, kendaraan dll)	Jumlah remitan yang begitu besar dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan keluarganya dan masyarakat desa Banyak jenis usaha yang potensial dan prospektif untuk dijadikan penyaluran remitan sebagai modal usaha buruh migran dan keluarganya	Penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan remitan untuk modal dan jenis usaha di desa Pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk pengelolaan remitan untuk modal usaha Melakukan pendampingan kewirausahaan mulai dari produksi sampai pemasaran Membuka akses jaringan kemitraan



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"  
19-20 November 2019  
Purwokerto*

3	Keberadaan Forum Warga Buruh Migran (FWBM) yang kurang efektif karena dalam pembentukannya kurang melibatkan aspirasi dari para buruh migran. Hanya beberapa perwakilan saja.	FWBM kedepannya dapat dijadikan sebagai lembaga induk dan pionir Musrena yang dapat menyampaikan aspirasi dari para buruh migran khususnya perempuan dalam kegiatan pemberdayaan mantan FWBM dalam program kerja desa melalui Musrenbangdes.	Penguatan kapasitas kelembagaan FWBM dengan pelatihan manajemen organisasi dan sosialisai advokasi Melakukan pertemuan rutin untuk membuka dialog dengan mengundang para buruh migran, calon dan mantan Forum Warga Buruh Migran (FWBM) lebih banyak supaya
4.	Belum adanya kesadaran akan arti pentingnya berorganisasi sebagai sarana wewujudkan kepentingan FWBM	Adanya organisasi bagi FWBM akan dapat memudahkan dalam menyampaikan atau mengaspirasikan suara mereka untuk didengar dan dijadikan agenda dalam musrenbangdes Banyaknya sumber daya dari calon dan mantan buruh migran yang dapat diberdayakan untuk mengelola suatu organisasi kemasyarakatan	kelembagaan lebih kuat dan menjadi milik bersama. Program pendampingan secara komprehensif bagi para calon dan mantan FWBM untuk meningkatkan kesadaran berorganisasi dan, beraspirasi menentukan arah pembangunan. Program pendampingan untuk emperkuat kelembagaan FWBM di desa
5.	Keberadaan buruh migran, calon dan mantan buruh migran yang cukup besar. Namun masih sangat rendah pengetahuan dan pemahaman Forum Warga Buruh Migran (FWBM) mengenai partisipasi dalam pembangunan desa sehingga kebutuhan dan kepentingannya kurang terakomodasi dalam program-program pembangunan desa	FWBM memiliki pengalaman,kemampuan, dan remitan yang dapat dijadikan sebagai modal sosial bagi pemberdayaan masyarakat Keberadaan FWBM, calon dan mantan FWBM dapat menjadi nilai lebih bagi suatu desa untuk membuat atau mengajukan program andalan yang berbasis kearifan lokal Partisipasi yang tinggi dari FWBM, calon dan mantan FWBM akan sangat berati dalam keberhasilan pembangunan desa dan juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka karena kegiatan yang dijalankan sesuai dengan harapan, kebutuhan dan rencana.	Penguatan kapasitas kelembagaan FWBM dengan pelatihan manajemen organisasi dan sosialisai advokasi Sosiliasi dan pelatihan buruh migran dalam membuat program pembangunan untuk dibahas dalam Musrena dan diusulkan di Musrenbang desa  Program pendampingan peningkatan kapasitas calon dan mantan FWBM,pendampingan penguatan kelembagaan dan implementasi Musrena. Merekomendasikan kepada pemerintah desa untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi perwakilan Forum Warga Buruh Migran (FWBM) dalam Musrenbang Desa Merekomendasikan pada pemerintah desa untuk membuat program pembangunan atau pemberdayaan yang berpihak pada Forum Warga Buruh





**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"  
19-20 November 2019  
Purwokerto*

			FWBM
6.	Masih minim program pembangunan desa yang berpihak pada perempuan	Sudah eksisnya lembaga/organisasi FWBM sebagai sarana penyaluran aspirasi kaum perempuan FWBM sudah sering dilibatkan dalam Musrenbang dan kegiatan pembangunan desa walau kurang maksimal dalam kesempatan ber partisipasi	

Sumber: Hasil Pengolahan dan Identifikasi Penelitian

### Sosialisasi dan Aktualisasi FWBM

Tahapan penelitian selanjutnya melaksanakan sosialisasi dan aktualisasi Forum Warga Buruh Migran (FWBM) karena selama ini mantan dan calon buruh migran kurang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan program pemberdayaan. Sebagaimana menurut beberapa kajian bahwa kaum perempuan, termasuk mantan dan calon buruh migran perempuan masih belum memiliki kesempatan secara terbuka untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan (Zohra 2008); (Kusnadi 2013); (Sugito et al. 2014); (Remiswal 2013); (Sulaiman et al. 2016). (2) Perlunya pengelolaan remitan buruh migran untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi keluarga dan investasi ekonomi masa depan dan masih banyaknya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia mulai dari proses pendaftaran, bekerja dan kepulangan sehingga perlu ada pendampingan (Wulan 2010); Sutaat et al. 2011); (3) Lemahnya perlindungan dan pelayanan hukum bagi buruh migran di daerah (Prihatinah et al. 2012; Ardhanariswari et al. 2012) . Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, dapat dibuat kegiatan sosialisasi dan aktualisasi Musrena bagi FWBM Cilacap sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2 Sosialisasi dan Aktualisasi FWBM

No	Nama Kegiatan	Indikator
1.	Sosialisasi konsep pembangunan partisipatif melalui Musrenbang desa	Calon dan Mantan FWBM mengetahui dan memahami bahwa pembangunan di era demokratisasi dan otonomi mulai perumusan dan pelaksanaan melibatkan masyarakat (bottom up) Calon dan Mantan FWBM memiliki semangat ikut berperanserta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam Musrenbang desa



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"*  
19-20 November 2019  
Purwokerto

2.	Sosialisasi Forum Warga Buruh Migran (FWBM)	Calon dan Mantan FWBM mengetahui latar belakang Musrena sebagai media komunikasi bagi perempuan dalam mengidentifikasi masalah & membuat program pemberdayaan yang berpihak kepada perempuan Calon dan Mantan FWBM termotivasi untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengusulan dan pelaksanaan pemberdayaan sebagai program yang akan disepakati dalam Musrena untuk selanjutnya diperjuangkan dalam Musrenbang desa.
3.	Simulasi pelaksanaan FWBM	Forum memilih ketua dan sekretaris sidang sementara untuk memilih ketua, wakil dan pengurus Prosedim Musrena Forum dapat memilih ketua dan wakil serta pengurus Prosedim Musrena yang selanjutnya memimpin Musrena untuk membahas dan menyepakati kepurusan Musrena menghasilkan rumusan dan menyetujui tata tertib Musrena dan prinsip-prinsip Musrena: (1) Kesetaraan, (2) Anggaran berkeadilan gender, (3) Musyawarah dialogis. (4) Anti dominasi, (5) Keberpihakan mengutamakan kelompok rentan, (6) Anti diskriminasi,  Musrena membuat dan menyepakati agenda kegiatan serta program pemberdayaan bagi Calon dan Mantan FWBM yang akan diperjuangkan dalam Musrenbang
4.	Rekomendasi hasil FWBM	Peneliti dan pengurus Musrena memberikan usulan atau rekomendasi kepada pemerintah desa untuk dapat memberikan ijin dan dukungan terhadap Musrena sebagai media komunikasi Calon dan Mantan FWBM Musrena dijadikan pra Musrenbang desa untuk merumuskan program pemberdayaan yang akan diusulkan dalam Musrenbang. Musrena sebagai media komunikasi dan sumber informasi Calon dan Mantan BMT dalam melakukan peningkatan ekonomi, pengetahuan, perlindungan dan advokasi terhadap Calon dan Mantan FWBM. Musrena dapat dijadikan solusi untuk menekan minat perempuan desa yang tanpa kemampuan dan pengetahuan menjadi FWBM dengan program pemberdayaan di desa dalam menjamin dan menciptakan kesejahteraan.

Sumber: Hasil Pengolahan dan Analisis Penelitian

## KESIMPULAN

Buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki problematika khususnya pada Forum Warga Buruh Migran (FWBM), mulai dari proses keberangkatan, masa bekerja sampai pada waktu kepulangan, setelah bekerja dan tidak lagi menjadi buruh migran. Kasus yang banyak muncul seperti penipuan, penjualan manusia (human trafficking), buruh migran illegal, penyalur kerja illegal, tindakan kekerasan, pelecehan, pembunuhan dan terjerat kasus hukum serta kembali



tidak berdaya menjadi pengangguran, disebabkan upah yang tidak dibayarkan majikan dan tidak dapat mengelola remitan hasil kerja.

Hasil penelitian menemukan bahwa calon dan mantan FWBM masih menilai bahwa menjadi buruh migran adalah profesi yang sangat menjanjikan jaminan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Walaupun banyak kasus yang mereka ketahui sangat merugikan dan mengancam kebahagiaan dan jiwanya, tetapi menganggap tidak ada lagi pilihan lain di desa, selain menjadi FWBM.

Pengetahuan dan pemahaman calon serta mantan di FWBM tentang hukum perburuhan dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan pembangunan di desa masih sangat awam. Media dan kemampuan mengakses informasi tentang perburuhan dan kelembagaan perempuan termasuk perburuhan juga masih lemah di tingkat desa. Masalah tersebut bisa diantisipasi salah satunya dengan memberikan kesempatan yang lebih terbuka, terprogram dan didukung oleh political will pemerintah mulai tingkat desa sampai kabupaten, yaitu perempuan desa khususnya di lokasi sumber FWBM diberikan kesempatan yang lebih terbuka.

Perempuan sebagai calon dan mantan FWBM dilibatkan ikut berpartisipasi dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan melalui media komunikasi dalam Forum Warga Buruh Migran (FWBM) untuk menjadi forum konsultasi dan advokasi bagi nasib perempuan untuk dapat membuat program pemberdayaan perempuan. Hasil FWBM akan diperjuangkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa yang menghasilkan program pemberdayaan yang mendukung bagi usaha serta jaminan kesejahteraan perempuan desa.

Komunikasi partisipatif dapat dijadikan pendekatan dalam sosialisasi, simulasi dan implementasi FWBM serta rekomendasi konsep kepada pemerintah desa sampai kabupaten untuk dijadikan kebijakan khusus, supaya terciptanya pekerjaan dan jenis usaha di desa bagi pemberdayaan perempuan serta tidak lagi menjadi buruh migran sebagai satu-satunya profesi yang dipertaruhkan. Model dapat diimplementasikan dan dikembangkan dengan melakukan penelitian lanjutan serta pendampingan, juga sebagai percontohan (*prototype*) bagi lokasi lain yang potensial memiliki banyak FWBM.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Kita semua, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed atas kebijakannya telah memberikan kesempatan dan dukungannya menyetujui serta mendanai penelitian ini. Kemudian kepada para informan kunci, subjek penelitian khususnya pihak pemerintah Desa dan Pengurus dan anggota Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai subjek penelitian para dan masyarakat di lokasi penelitian yang telah



memberikan ijin, mendukung dan bekerjasama untuk kegiatan penelitian, termasuk terima kasih kepada mitra riset yang telah mendukung kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., 2010. Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1) : 1-19.
- Ardhanariswari, R., Handoko, W., & Marwah, S. 2012. Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*. 12(1): 1-14.
- Dasgupta, S, Sonagachi Project : A Case-Study Set India. 2009. McPhail TL, editor. *Development Communication : Reframing The Role of Media*. Malden, Oxford : Blackwell Publishing Ltd.
- Dewi, Elisabeth., & Yazid, S. 2017. Tata Kelola Remitansi Buruh Migran Indonesia oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Akar Rumput: Praktik Baik, Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*. 6(2): 209-220.
- Koesoemowardani, N., & Sumardjo., 2008. Peran Komunikasi dalam Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 6(2) : 51-65.
- Kriyantono, R. 2006. *Riset Komunikasi*. Kencana. Jakarta.
- Kusnadi. 2013. *Perempuan Pesisir*. LkiS Printing Cemerlang. Yogyakarta.
- Maftuhin, A. 2017. Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator. *Jurnal Tata Loka*. 19(2): 93-103.
- Mardikanto, & Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat : dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Milles, M.B., & Huberman, A.M., 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah : Tjetjep Rohendi Rohid. UI Press. Jakarta.
- Nursiti, S.E., 2011 Kontribusi Musrena terhadap Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Kota Banda Aceh. Di dalam Mahdi et al. *Membangun Kota Berbasis Gampong: Tinjauan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Banda Aceh*. [Laporan Hasil Penelitian]. (Kerjasama Program Riset, Pendampingan, dan Advokasi Pemerintah Kota Banda Aceh, Indonesia Pemerintah Kota Apeldoorn, Belanda Aceh Institute – Cordaid.
- Pierson, J. 2010. *Tackling Social Exclusion* . Routledge. New York.
- Porras, L.E .,& Steeves, H.L., 2009. *Feminism in a Post-Development Age* : McPhail, Thomas L, editor. *Development Communication : Reframing The Role of The Media*. Malden, Oxford : Blackwell Publishing Ltd.
- Prihatinah, T.S., Asyik, N., & Kartono, 2012. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Dinamika Hukum*. 12(2): 312-320.
- Rais, D.U. 2017. Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. *Jurnal Reformasi*. 7(2): 88-106.
- Remiswal., 2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Graha Ilmu.



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"*  
19-20 November 2019  
Purwokerto

---

Yogyakarta.

- Subianto, A., 2006. Pengaruh Pemanfaatan Remitan Buruh Migran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Sugito, T., Windiasih, R., & Sulaiman, A.I. 2018. Aktualisasi Pembangunan Partisipatif dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan Desa. *Acta Diurna*. 14(1): 1-16.
- Sulaiman, A.I., Sugito, T., & Sabiq, A. 2016. Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 13(2):233-255.
- Sutaat., Setiti, S.G., Widodo, N., & Unayah, N. 2011. *Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal*. Nitimihardjo C, editor. P3KS Press. Jakarta.
- Wirutomo, P. 2013. Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. Masyarakat: *Jurnal Sosiologi*. 18(1): 101-120.
- Wulan, T.R, 2010. Pengetahuan dan Kekuasaan : Penguatan Remitan Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Forum Warga Buruh Migran (FWBM). *Disertasi*. Institut Pertanian Bogor.